

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KOORDINASI

2.1.1 Pengertian Koordinasi

Koordinasi berasal dari kata coordination, co dan ordinare yang berarti to regulate. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu (Ndraha, 2003:290). Dalam kamus besar Indonesia, koordinasi diartikan sebagai perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yg akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.

Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen dimana manajemen pada hakekatnya adalah untuk melakukan segala kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangkai menacapai tujuan yang telah ditentukan pad tingkt dministrai, maka jelaskan bhwa dalam kegiatan dministrsi untuk mencapai tuju diperlukan dministrasi.

Sebelum menguraikan pengetian koordinasi,penuli lebih dulu menguraikan beberapa pengertin manajemen :

Menurut Sondang P. Siagian,(2002:5) menyatakan:”Manajemen dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain”.

Menurut G.R.Terry yang dikutip oleh Moekijat (2002:7), mengatakan : “Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisaian,penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dena menggunakan manuia-manusia dan sumber-sumber lainnya”.

Dari kedua definisi tersebut nampak bahwa manajemen merupakan proses kegiatan yang didalamnya terdapat dua unsur yaitu:

1. Dalam pengertian manajemen selalu terdapat tujuan atau sasaran yang ingin dicapai.
2. Kegiatan-kegiatan yang untuk mencapai tujuan tersebut dengan melalui sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, seperti uang, peralatan, metode kerja (Tool of management)

Dari uraian diatas, terlihat bahwa kegiatan manajemen tidak dapat dipisahkan dari kegiatan administrasi, karena administrasi merupakan proses pekerja sama dari orang-orang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan, dan kerja sama itu diselenggarakan dengan cara-cara yang merupakan masalah manajemen.

Salah satu fungsi manajemen dari kegiatan tersebut adalah koordinasi, adapun mengenai fungsi, itu sendiri yang dikemukakan oleh The Liang Gie (2002:166) adalah:

Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya atau pun pelaksanaannya untuk memperlancar suatu usaha kerja sama aktivitas yang sama jenisnya biasanya digabungkan menjadi tanggung jawab pada seorang pejabat atau suatu orang tersebut.

Adapun pendapat para sarjana tentang fungsi-fungsi manajemen yang diutarakan oleh Sondang P. Siagian, (2002:103-107) adalah :

a. Menurut Henry Fayol, adalah:

1. Planning (Perencanaan)
2. Organizing (Pengorganisasian)
2. Commanding (Pemberi komando)
3. Coordinating (koordinasi)
4. Controlling (pengawasan)

b. Menurut G.Rr. Terry adalah:

1. Planning (perencanaan)
2. Organizing (pengorganisaian)
3. Actuating (penggerakan)
4. Controlling (pengawasan)

Dari beberapa pendapat tersebut diatas bahwa fungsi-fungsi manajemen merupakan suatu proses yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Koordinasi adalah mengerjakan salah satu koordinasi dapat melaksanakan manajemen, sehingga koordinasi ini demikian pentingnya terutama terhadap sejumlah bagian-bagian yang besar dan luas dalam suatu organisasi.

Selanjutnya untuk memahami pengertian koordinasi penuliskan beberapa pendapat:

Menurut Sondang P, (2002:110) mengemukakan bahwa koordinasi dapat diartikan sebagai: "Pengaturan tata hubungan semi usaha untuk memperoleh kesatuan tindakan dan usaha mencapai bersama pula. Koordinasi adalah proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai bidang atau kelompok dapat tersusun menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dengan cara seefisien mungkin".

Menurut G.R Terry yang mengemukakan bahwa koordinasi adalah: "Koordinasi adalah proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai bidang atau kelompok dapat tersusun menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dengan cara seefisien mungkin".

Menurut G.R. Terry memberikan arti bahwa: "Koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan kualitas tindakan dan pengarahan yang menghasilkan keeleraan dan kesatuan tindakan untuk tujuan yang telah ditetapkan".

Menurut panglaykin dan hazil (2007:91) mengemukakan bahwa:“Koordinasi dapatlah kita artikan sebagai pengaturan yang tertib dan kumpulan/gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. Koordinasi merupakan saling pengertian, saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi”.

Menurut M.Manullang (2001:23) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:“Coordinating atau pengkoordinasian merupakan salah satu fungsi manajemen melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, perpecahan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatupadukan, dan menyelaraskan pekerjaan-pekerjaan bawahannya sehingga terdapat kerja yang terarah dalam mencapai tujuan usaha bersama atau tujuan organisasi”.

Beritik tolak dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah suatu usaha keselarasan kerja antara suatu unit organisasi atau instansi terkait dengan yang lainnya, sehingga diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran dan dapat bertindak tepat dalam melaksanakan pekerjaan. Hal ini berarti koordinasi dapat dilaksanakan dalam suatu kegiatan yang terpadu untuk menapai tujuan yang telah ditetapkan. Walaupun dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Walaupun dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan telah ada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Tetapi kesimpangsiuran, penyimpangan serta ketidaktepatan masih sering terjadi. Oleh karena adanya kecenderungan tiap orang atau bagian yang mendapatkan tugas tertentu, untuk mendapatkan

melaksanakan tugasnya sendiri-sendiri tanpa memperhatikan tugas dan pekerjaan pihak lain.

Sehingga dapat mendapatkan kepercayaan dalam kegiatan keeluruhan. Dengan demikian koordinasi muntlak diperlukan, sebab dengan koordinasi dikemungkinan adanya kesatuan, keterpaduan antara organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Ngan dmikian dalam koordinasi harus ada keselarasn aktivitas antara orang, badan instansi maupun unit organisasi, dimana untuk menciptakan keselarasn tersebut salah satu upaya yang ditemput adalah dengan cara melaksanakan kordinasi.

2.1.2. Ciri-Ciri Koordinasi

Soewarno Handyaningrat (2002:58) mengatakan bahwa cir-ciri koordinasi adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa tanggung jawab dari koordinasi adalah terletak pada pimpinan
- b. Adanya proses (continued proses)
- c. Pengaturan secara teraturan dari usaha kelompok
- d. Konsep kesatuan tindakan
- e. Tujuan koordinasi adalah tujuan-tujuan bersama.

Penejelasan dari ciri-ciri koordinasi tersebut dapat penulis uraikan sebagai berikut:

A. Bahwa tanggung jawab dari koordinasi adalah terletak pada pimpinan

Dimaksud bahwa koordinasi adalah suatu tugas dari pimpinan, dan pimpinan tidak mungkin mengadakan koordinasi apabila mereka tidak melakukan kerja sama, oleh karena itu mereka kerjasama merupakan suatu syarat penting dalam membantu pelaksanaan koordinasi. Dan pimpinan dapat berhasil apabila ia telah melakukan koordinasi dengan baik.

B. Adanya proses (Continued process)

Dimaksud bahwa koordinasi adalah pekerjaan dari pimpinan yang berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat dicapai dengan baik.

C. Peraturan secara teratur dari pada usaha kelompok

Dimaksudkan bahwa koordinasi adalah erupakan konsep yang telah ditetapkan didalam kelompok, bukan terhadap usaha individu, maka sejumlah individu yang bekerjasama, imana dngn koordinasi menghasilkan suatu kelompok yang sangat penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi.

D. Konsep Kesatuan Tindakan

Yang dimaksud kesatuan tindakannya adalah merupakan inti dari pada koordinasi. Dalam hal ini pimpinan mengatur usaha-usaha atau tindakan-tindakan dari pada setiap kegiatan individu sehingga adanya keseleran di dalam mencapai hasil bersama. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan

suatu kewajiban dari pada pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik. Dengan mengatur jadwal waktu yang dimaksudkan bahwa keutuhan usaha dapat berjalan sesuai waktu yang telah direncanakan sebelumnya.

E. Tujuan Koordinasi adalah tujuan bersama

Bahwasanya kesatuan tindakan meminta keaduan prngrtian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja

Selanjutnya ciri-ciri koordinasi Mc. Farland yang dikutip oleh Seowarno Hadayaingrat (2002:89-90) yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa tanggungjawab koordinasi adalah terletak pada pimpinan. Oleh karena itu, koordinasi adalah merupakan tugas pimpinan. Koordinasi sering dicampur-adukkan dengan kata koperasi yang sebenarnya mempunyai arti yang berbeda. Sekalipun demikian pimpinan tidak mungkin mengadakan koordinasi apabila mereka tidak melakukan kerjasama. Oleh karena itu, maka kerjasama merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam membantu pelaksanaan koordinasi.
2. Adanya proses (continues process). Karena koordinasi adalah pekerjaan pimpinan yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.
3. Pengaturan secara teratur usaha kelompok. Oleh karena koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu, maka sejumlah individu yang bekerjasama, di mana dengan

koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih, kekaburan dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan pertanda kurang sempurnanya koordinasi.

4. Konsep kesatuan tindakan. Hal ini adalah merupakan inti dari koordinasi. Kesatuan usaha, berarti bahwa harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil.
5. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama, kesatuan dari usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok di mana mereka bekerja.

2.1.3 Teknik-teknik Koordinasi

Soewarno Handyaningrat (2002:124) mengemukakan bahwa metode dan teknik yang dapat dipakai melaksanakan koordinasi, dapat terdiri atas.

1. Koordinasi melalui kewenangan
2. Koordinasi melalui konsensus
3. Koordinasi melalui pedoman kerja
4. Koordinasi melalui forum
5. Koordinasi melalui suatu konferensi

Mengenai cara atau teknik pelaksanaan koordinasi menurut pendapat

M.Manullange (2001:38-39) adalah sebagai berikut:

Koordinasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain ada

4(empat) usaha penelitian koordinasi yaitu:

1. Mengadakan pertemuan reuni antar unsur-unsur atau unit-unit yang harus dikoordinasikan
2. Mengangkat seseorang
3. Membuat buku pedoman
4. Mengadakan pertemuan-pertemuan informal

2.1.4 Prinsip-prinsip Koordinasi

Koordinasi merupakan azas dasar organisasi dan juga termasuk salah satu fungsi manajemen yang disebut pula sebagai pengorganisasian. Koordinasi sebagai azas organisasi, karena dengan koordinasi akan terdapat adanya kesatuan gerak, dan keterpaduan diantaranya unit-unit organisasi sesuai dengan pembagian tugasnya. Untuk melaksanakan koordinasi secara efektif, maka harus diperhatikan juga prinsip-prinsip koordinasi S.Pamudji (2004:41) mengemukakan 4(empat) prinsip utama koordinasi yaitu:

1. Koordinasi harus dimulai pada permulaan sekali
2. Koordinasi merupakan tahapan yang kontinyu
3. Sepanjang kemungkinan koordinasi harus merupakan pertemuan-pertemuan bersama.
4. Perbedaan-perbedaan pandangan harus dikemukakan secara terbuka dan diselidiki hubungannya dengan keseluruhan.

Penejelasan dari prinsip-prinsip diatas penulis uraikan sebagai berikut:

1. Koordinasi harus dimulai permulaan sekali

Dalam koordinasi kegiatan yang pertama kali dilaksanakan adalah membuat rencana kerja, setelah terlebih dahulu adanya pembagian kerja, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing unit organisasi, sebab koordinasi bukan dilaksanakan secara kebetulan tetapi harus berdasarkan pada pedoman yang lebih dimasukkan kedalam perencanaan. Dengan perencanaan yang baik, maka dapat dihindarkan berbagai kesimpangsiuran. Termasuk pelaksanaan dalam koordinasi itu sendiri. Dengan demikian koordinasi itu sendiri. Dengan demikian koordinasi harus sudah dilaksanakan dari tahap permulaan proses manajemen untuk mencegah gejala-gejala yang mungkin timbul.

2. Koordinasi adalah tahap kontinyu

Bahwasanya koordinasi bukanlah merupakan suatu kegiatan untuk satu jenis pekerjaan saja dan untuk satu waktu saja. Sebab suatu kegiatan dari suatu kegiatan itu kan makin kompleks serta melibatkan banyak orang sehingga kecenderungan akan adanya kesimpangsiuran akan lebih baik mengenai prosedur kerja, sistem serta cara kerja.

3. Sepanjang kemungkinan koordinasi harus merupakan pertemuan-pertemuan

Karena koordinasi merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan dan menyempatkan kegiatan-kegiatan yang ditangani oleh berbagai orang atau organisasi. Untuk itu diperlukan adanya pertemuan-pertemuan bersama, dan melalui pertemuan itulah dapat diketahui

masalah-masalah yang dihadapi dan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut dapat segera diinformasikan dan dapat pula untuk diputuskan. Pertemuan-pertemuan bersama dapat dijadikan alat kontrol untuk menghindari kekaburandan ketidakjelasan.

4. Perbedaan-perbedaan pandangan harus dikemukakan secara terbuka dan diseleksi hubungan situasi seluruhnya

Dikemukakan adanya lebih dari satu orang atau unit organisasi yang harus diseleraskan dan dipadukan kegiatan kerjanya, tentunya dari masing-masing sendiri dalam pemecahan persoalan, perbedaan pandangan itu disebabkan adanya kepentingan berbeda-beda. Hal tersebut harus mendapatkan perhatian dari semua orang atau unit organisasi yang bergabung dalam pemecahan masalah yang dihadapi, sehingga stabilitas kerja dari semua pihak akan lebih terjamin.

Cara yang lebih baik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan itu adalah dengan adanya keterbukaan dari semua pihak dan saling menghormati sehingga permasalahan dapat didefinisikan untuk mencari jalan keluar yang tepat secara bersama-sama.

2.1.5 Syarat-syarat Koordinasi

Mengenai syarat-syarat koordinasi William Newman yang dikutip oleh Sarwoto (2006:18) dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen mengatakan:

1. Agar bentuk organisasi disederhanakan hingga vertikal sependek mungkin. kalau tidak sangat perlu jangan mengadakan bagian-bagian yang sudah ada.
2. Menyelaraskan yang sudah ada.
3. Mengenai prosedur kerja diatur secara rapih, juga metode kerja, diatur hubungan antara atasan dan bawahan demikian pula sebaliknya antara bawahan dan atasan, diatur tentang komunikasi vertikal dan horizontal;
4. Menimbulkan kehendak baik untuk dikoordinasi, dipupuk adanya rasa solidaritas.
5. Koordinasi melewati pengawasannya hendaknya dilakukan secara efektif oleh pimpinan.

2.1.6 Macam-macam Koordinasi

Malayu Hasibuan (2003:128-129) mengatakan bahwa koordinasi dapat dibedakan oleh koordinasi dapat dibedakan oleh koordinasi dapat dibedakan oleh koordinasi horizontal, yaitu:

A. Koordinasi Vertikal

Yaitu suatu tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang dibawah wewenang dan tanggung jawabnya, tegasnya atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada dibawah tanggung jawabnya secara langsung.

B. Koordinasi Horizontal

Adalah suatu tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dijalankan terhadap kegiatan-kegiatan dalam level organisasi yang tersingkat.

2.2 PEMBINAAN

2.2.1 Pengertian Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan adalah kegiatan untuk memelihara agar sumber daya manusia dan organisasi tetap asas dan konsisten melakukan rangkaian kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pembinaan mencakup tiga subfungsi yaitu pengawasan (controlling) penyeliaan (supervising) dan pemantauan (monitoring). Pengawasan pada umumnya dilakukan terhadap lembaga penyelenggara program, penyeliaan dilakukan terhadap pelaksana kegiatan, dan pemantauan proses pelaksanaan kegiatan.

Pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing, supaya dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik.

Menurut Mathis (2002:112) pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.

2.2.2 Tujuan Pembinaan

Adapun tujuan umum pembinaan sebagai berikut :

1. Untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat.
2. Untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya secara rasional, dan
3. Untuk mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman pegawai dan dengan manajemen yang baik (pemimpin).

Sedangkan komponen-komponen pembinaan yang dijelaskan oleh Mangkunegara (2005:76) terdiri dari:

1. Tujuan dan sasaran pembinaan dan pengembangan harus jelas dan dapat diukur.
2. Para pembina yang profesional.
3. Materi pembinaan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai.
4. 4. Peserta pembinaan dan pengembangan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.

2.2.3 Pola Pembinaan

Istilah pola pembinaan diartikan sebagai model atau acuan yang digunakan untuk memperbaharui atau membangun kearah yang lebih baik, tidak lain yang menjadi objek pembinaan adalah para anak jalanan. Pola pembinaan merupakan kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut.

Swasta dan Handoko (1997:10), mengemukakan Pola pembinaan adalah tingkah laku seseorang yang bermaksud merubah keadaan psikis atau fisik penerima sedemikian rupa, sehingga si penolong akan merasa bahwa si penerima menjadi lebih puas secara material ataupun psikologis

Bartal (1976:7) mengemukakan pola pembinaan sosial adalah tingkah laku yang menimbulkan konsekuensi positif bagi kesejahteraan fisik maupun psikis orang lain. Pembinaan sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu:

1. Faktor situasional yang meliputi: kehadiran orang lain, faktor lingkungan dan kebisingan, faktor tanggungjawab, faktor kemampuan yang dimiliki, faktor desakan waktu, latar belakang keluarga, dan
2. Faktor internal yang meliputi: faktor pertimbangan untung rugi, faktor nilai-nilai pribadi, faktor empati agama, suasana hati, faktor sifat, faktor tanggungjawab, faktor agama, tahapan moral, orientasi seksual, jenis kelamin.

3. Faktor penerima bantuan yang meliputi: karakter orang yang memerlukan pertolongan, asal daerah, daya tarik fisik.
4. Faktor budaya meliputi: nilai dan norma yang berlaku pada suatu masyarakat khususnya norma tanggungjawab sosial, norma timbal balik dan norma keadilan.

2.2.4 Fungsi Pembinaan

Untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, maka diperlukan adanya pegawai-pegawai yang setia, taat, jujur, penuh dedikasi, disiplin dan sadar akan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku, fungsi pembinaan diarahkan untuk :

1. Memupuk kesetiaan dan ketaatan.
2. Meningkatkan adanya rasa pengabdian rasa tanggung jawab, kesungguhan dan kegairahan bekerja dalam melaksanakan tugasnya.
3. Meningkatkan gairah dan produktivitas kerja secara optimal.
4. Mewujudkan suatu layanan organisasi dan pegawai yang bersih dan berwibawa.
5. Memperbesar kemampuan dan kehidupan pegawai melalui proses pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi (wadah yang ditentukan).

2.3 PROSTITUSI

2.3.1 Pengertian Prostitusi

Prosti Secara etimonologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “pro-stituere” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata ‘prostitute’ merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).

Koentjoro: “yang menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.”

Sarjana P.J de Bruine van Amstel: “prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.”

Paul Moedikdo Moeliono: “prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu.”

Prof W.A Bonger: “Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.” Menurut Commenge dalam Tjahjo Purnomo(1985:10) prostitusi atau pelacuran adalah suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukan untuk memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang kepada wanita tersebut.

Soerjono Soekanto (1990:374) mengatakan prostitusi atau pelacuran merupakan suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah

Kartini Kartono mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut:

1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
2. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsunafsu seks dengan imbalan pembayaran.

3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Berdasarkan pendapat diatas dapat di katakan beberapa hal :

1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa terkendali dengan banyak orang disertai eksploitasi dan komersialisasi, impersonal tanpa afeksi sifatnya.
2. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan jalan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada orang banyak untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan bayaran.
3. Pelacuran ialah perbuatan yang dilakukan perempuan dengan meyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapat upah.
4. Dari beberapa pendapat diatas dapat peneliti simpulkan bahwa prostitusi/pelacuran adalah suatu perilaku menyimpang dimana wanita lah yang menjadi obyek, baik wanita dewasa maupun anak-anak yang menjual tubuhnya ke kaum laki-laki untuk mendapatkan upah/bayaran.

Prostitusi, adalah melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan. Para penjual diri tersebut sering disebut WTS (Wanita Tuna Susila). Mereka adalah para

wanita yang tidak mempunyai susila (adab, akhlak, kesopanan). Sedang para pembelinya disebut hidung belang, yaitu para pembeli sex yang menghamburkan uangnya demi terpuaskannya nafsu birahi. Lokalisasinya disebut kompleks pelacuran atau ajang berkumpul dalam melakukan pesta sexnya. Adapun orang yang menampung para pelacur dan hidung belang dalam melakukan transaksi sexnya disebut mucikari atau germo. Orang inilah yang amat mendukung terlaksananya pesta maksiat itu. Ia mendapat imbalan dari para pelacur dari penghasilannya, sekian persen.

2.3.2 Ciri-Ciri Prostitusi

Di desa-desa, hampir-hampir tidak terdapat pelacur. Jika ada, mereka itu adalah pendatang-pendatang dari kota yang singgah untuk beberapa hari atau pulang ke desanya. Hal tersebut merupakan realitas yang ada di masyarakat bahwasannya prostitusi merupakan efek dari modernisasi dan globalisasi demi pemenuhan kebutuhan seks. Seseorang yang tanpa mempunyai suatu keterampilan akan sulit bersaing pada era globalisasi seperti sekarang ini.

Dengan modal pengetahuan dan keterampilan yang seadanya, tanpa mengetahui perbedaan yang sangat kontras antara perdesaan di kota-kota kecil dengan perkotaan merupakan kendala utama dalam memperoleh pekerjaan yang diimpikan sebelumnya. Keadaan terpaksa oleh kegagalan demi kegagalan untuk mendapatkan pekerjaan legal, keengganan untuk

kembali ke desa, ditunjang dengan tipuan dan rayuan para lelaki hidung belang merupakan langkah awal menuju dunia prostitusi.

Prostitusi merupakan profesi tertua di dunia. Semenjak ada kehidupan manusia, telah ada prostitusi, dan akan terus ada selama masih ada kehidupan manusia. Menurut Kartini Kartono hal ini didasarkan anggapan bahwa secara naluriah, manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, melalui berbagai cara dan usaha dalam bentuk budaya, mempunyai kehendak yang antara lain:

1. mempertahankan dirinya dari gangguan dan tantangan yang ada;
2. mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupannya;
3. mempertahankan hidup generasinya melalui perkawinan;
4. mengadakan hubungan seksual antara kedua jenis kelamin untuk memenuhi kebutuhan biologis; dan lain-lain.

Dari pendapat beberapa ahli melalui hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa di dalam praktek prostitusi terdapat unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Para pelaku atau subyek prostitusi adalah orang laki-laki dan orang perempuan di luar hubungan pernikahan.
2. Peristiwa yang dilakukan adalah hubungan seksual atau hubungan persetubuhan, yang dilakukan atas kesepakatan bersama antara kedua pihak, atau bukan karena paksaan.

3. Tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan biologis (bagi laki-laki), dan kebutuhan uang (bagi perempuan).

2.3.3 Jenis Prostitusi

Menurut Kartini Kartono jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktivitasnya yaitu terdaftar dan terorganisasi, dan yang tidak terdaftar :

1. Prostitusi yang terdaftar Pelakunya diawasi oleh bagian Vice Control dari Kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan Jawatan Sosial dan Jawatan Kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam satu daerah tertentu.
2. Prostitusi yang tidak terdaftar Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisasi, tempatnya pun tidak tertentu. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib.

Sejalan dengan itu kartini kartono dalam bukunya Patologi Sosial jilid 1 Edisi Baru (186-188) Profesi yang dimasukan dalam kategori pelacuran antara lain ialah:

1. Pergundian: pemeliharaan bini tidak resmi, bini gelap atau perempuan piaraan. Mereka hidup sebagai suami istreri, namun tanpa ikatan perkawinan. Gundik-gundik orang asing ini pada zaman pemerintahan belanda dahulu disebut nyai.

2. Tante girang atau loose married woman: Yaitu wanita yang sudah kawin, namun tetap melakukan hubungan erotic dan seks dengan lakilaki lain; baik secara iseng untuk mengisi waktu kosong, bersenangsenang “just for fun” dan mendapatkan pengalaman-pengalaman seks lain, maupun secara intensional untuk mendapatkan penghasilan.
3. Gadis-gadis panggilan: ialah gadis-gadis dan wanita-wanita biasa yang menyediakan diri untuk dipanggil dan dipekerjakan sebagai prostitute, melalui saluran-saluran tertentu. Mereka ini terdiri atas ibuibu rumah tangga, pelayan-pelayan toko, pegawai-pegawai, buruhburuh perusahaan, gadis-gadis lanjutan, para mahasiswi, dan lain-lain.
4. Gadis-gadis bar atau B-girls: yaitu gadis-gadis yang bekerja sebagai pelayan-pelayan di bar dan lebih luas lagi bekerja di tempat-tempat yang biasa dijadikan tempat nongkrong dan sekaligus bersedia memberikan layanan seks kepada para pengunjung.
5. Gadis-gadis juvenile delinquent: Gadis-gadis muda dan jahat yang didorong oleh ketidakmatangan emosinya retardasi/ keterbelakangan inteleknya, menjadi sangat psiaif dan sugestibel sekali. Karakternya sangat lemah. Sebagai akibatnya, merka itu mudah sekali jadi pecandu minuman-minuman keras atau alkoholok, dan pecandu obat-obat bius (ganja, heroin, morfin, dan lain-lain), sehingga mudah tergiur melakukan perbuatan-perbuatan immoral seksual dan pelacuran.

6. Gadis-gadis binal atau Free Girls: di Bandung mereka menyebut diri sebagai “bagong lieur” (babi hutan yang mabuk). Mereka itu adalah gadis-gadis sekolah atau putus sekolah, putus studi di akademi atau fakultas, dengan pendirian yang “brengsek” dan menyebarkan kebebasan seks secara ekstrem, untuk mendapatkan kepuasan seksual. Mereka menganjurkan seks bebas dan cinta bebas.
7. Gadis-gadis taxi (di Indonesia ada juga gadis-gadis becak); yaitu wanita-wanita cantik dan gadis-gadis panggilan yang ditawarkan dibawa ketempat “plesiran” dengan taksi-taksi atau becak.
8. Penggali emas atau gold-diggers: yaitu gadis gadis dan wanita-wanita cantik ratu kecantikan, pramugari/mannequin, penyanyi, pemain panggung, bintang film, pemain sandiwara, teater atau opera, anak wayang, dan lain-lain yang pandai merayu dan bermain cinta, untuk mengeduk kekayaan orang-orang berduit. Pada umumnya, sulit sekali mereka itu diajak bermain seks. Yang diutamakan oleh mereka ialah: dengan “kelihatannya” menggali emas dan kekayaan dari pada “kekasihnya”.
9. Hostes atau pramuria yang menyemarakkan kehidupan malam dalam nightclub-nightclub (vide EL Ci Ci, Mirasa, Nirwana, Golden Gate, Bina Ria, Mini Disco, Tanamur di Jakarta). Pada intinya, profesi hostes merupakan bentuk pelacuran halus. Sedang pada hakikatnya, hostes itu adalah predikat baru dari pelacuran. Sebab, di lantai-lantai dansa mereka itu membiarkan diri dipeluki, diciumi dan diraba-raba seluruh

badannya. Juga di meja-meja minum badannya diraba-raba dan diremas-remas oleh langganan. Para hostes ini harus melayani

10. makan, minum, dansa dan memuaskan naluri-naluri seks para langganan dengan jalan menikmati tubuh para hostes/pramuria tersebut. Dengan demikian langganan bisa menikmati keriaan atau kesenangan suasana tempat-tempat hiburan
11. Promis kuitas/promiscuity ialah: hubungan seks secara bebas dan awut-awutan dengan pria mana pun juga; dilakukan dengan banyak laki-laki.

2.3.5 Sebab-Sebab Terjadinya Prostitusi

Alasan-alasan mengapa seseorang menjadi pelacur bisa sangat kompleks, tidak saja dari prostitusi itu sendiri melainkan juga dari keluarga dan masyarakat disekelilingnya. Tetapi secara sengaja menjadi prostitusi jarang dijumpai sebagai salah satu factor penyebab karena bagaimanapun pekerjaan ini dianggap bertentangan dengan normal.

A. Beberapa peristiwa penyebab prostitusi menurut Kartini Kartono antara lain sebagai berikut:

1. Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran. Juga tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan atau di luar pernikahan;
2. Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawinan;

3. Komersialisasi dari seks, baik di pihak wanita maupun mucikari dan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks;
4. Dekadensi moral, merosotnya norma-norma susila dan keagamaan pada saat-saat orang mengenyam kesejahteraan hidup dan ada pemutarbalikan nilai-nilai pernikahan sejati;
5. Semakin besarnya penghinaan orang terhadap kaum wanita dan harkat manusia;
6. Kebudayaan eksploitasi pada zaman modern ini, khususnya mengeksploitasi kaum lemah (wanita) untuk tujuan-tujuan komersil;
7. Ekonomi laissez-faire (ekonomi pasar bebas) menyebabkan timbulnya sistem harga berdasarkan hukum “jual dan permintaan”, yang diterapkan pula dalam relasi seks;
8. Peperangan dan masa-masa kacau (dikacau oleh gerombolan-gerombolan pemberontak) di dalam negeri meningkatkan jumlah prostitusi;
9. A adanya proyek-proyek pembangunan dan pembukaan daerah-daerah baru pertambangan dengan konsentrasi kaum pria, sehingga mengakibatkan adanya ketidakseimbangan rasio pria dan wanita;
10. Bertemunya macam-macam kebudayaan asing dan kebudayaan masyarakat setempat

B. Faktor pendorong menjadi wanita tuna susila yaitu:

1. Terpaksa keadaan ekonomi, keadaan ekonomi memaksa seseorang untuk menjalani prostitusi. Termasuk dalam faktor ini antara lain berasal dari

keluarga dengan sosial ekonomi rendah, kebutuhan mendesak untuk mendapatkan uang guna membiayai diri sendiri maupun keluarganya, tidak mempunyai sumber penghasilan, tingkat pendidikan rendah, minimnya keterampilan dan sengaja dijual oleh keluarganya ketempat pelacuran

2. Ikut arus, prostitusi dianggap sebagai pilihan yang mudah dalam mencari nafkah karena rekan-rekan mereka di kampung sudah melakukannya dan bagi masyarakat daerah mereka pelacuran merupakan alternatif pekerjaan.
3. Frustrasi, kegagalan seseorang untuk mencapai tujuan hidup disebut frustrasi. Seseorang yang sangat mendambakan kehidupan rumah tangga yang bahagia akan frustrasi bila mengalami perceraian, seorang yang mencintai kekasihnya akan frustrasi bila mengalami kegagalan cinta. Keadaan ini dapat menimbulkan rasa kecewa dan sakit hati. Pada umumnya mereka yang terlibat dalam prostitusi karena ingin membalas sakit hatinya.

Mengacu dengan yang telah diterangkan di atas, hemat penulis bahwa penyebab timbulnya prostitusi itu ada 2, yakni dari faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal Faktor internal adalah yang datang dari individu wanita itu sendiri, yaitu yang berkenaan dengan hasrat, rasa frustrasi, kualitas konsep diri, dan sebagainya. Tidak sedikit dari para pelacur ini merupakan korban perkosaan, sehingga mereka berpikir bahwa mereka sudah kotor dan profesi sebagai pelacur merupakan satu-satunya yang pantas bagi mereka. Karena kehidupan kelam yang mereka alami dulu membuat hati dan moral mereka terpuruk.

2. Faktor eksternal, Faktor eksternal adalah sebab yang datang bukan secara langsung dari individu wanita itu sendiri, melainkan karena ada faktor luar yang mempengaruhinya untuk melakukan hal yang demikian. Faktor eksternal ini bisa berbentuk desakan kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan, kegagalan kehidupan keluarga, kegagalan percintaan dan sebagainya.

C. Konsekuensi/Akibat yang Dihadapi Pelaku Prostitusi:

Semua perilaku pasti memiliki efek di belakangnya, entah itu efek positif maupun negatif. Begitupun pelacuran, karena pelacuran merupakan perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat dan agama, maka pelacuran hanya akan mengakibatkan efek negatif. Menurut Kartini Kartono beberapa akibat yang ditimbulkan oleh prostitusi ialah sebagai berikut:

1. Menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit;
2. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. Suami-suami yang tergoda oleh PSK biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga, sehingga keluarga menjadi berantakan;
3. Mendermoralisasi atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak mudaremja pada masa puber dan adolesensi;
4. Berkolerasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkoba;
5. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama. Terutama sekali menggoyahkan norma perkawinan, sehingga menyimpang dari adat

kebiasaan, norma hukum, dan agama, karena digantikan dengan pola pemuasan kebutuhan seks dan kenikmatan seks yang awut-awutan, murah serta tidak bertanggung jawab;

6. Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain. Pada umumnya wanita PSK itu Cuma menerima upah sebagian kecil saja dari pendapatan yang harus diterimanya, karena sebagian besar harus diberikan kepada mucikari dan oknum-oknum lain yang membantunya;
7. Bisa menyebabkan terjadinya disfungsi seksual seperti impotensi.

2.3.6 Penanggulangan Prostitusi

Prostitusi sebagai masalah sosial ssejak sejarah kehidupan manusia sampai sekarang dan selalu ada pada ssetiap tingkatan perradaban, perlu ditanggulangi dengan penuh kesungguhan. Usaha ini sangat sulit melalui proses dan waktu yang sangat panjang, dan memerlukan biaya yang sangat besar. Pada garis besarnya, usaha untuk mengatasi prostitusi dapat dibagi menjadi dua, yaitu: usaha yang bersifat peventif serta tindakan yang bersifat represif dan kuratif. Usaha bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya prostitusi. Kegiatan yang berupa usaha preventif antara lain:

1. Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan prostitusi;

2. Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan;
3. Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi anak-anak remaja untuk menyalurkan kelebihannya;
4. memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya;
5. Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga;
6. Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan prostitusi yang dilakukan oleh beberapa instansi sekaligus mengikutsertakan potensi masyarakat lokal untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan atau penyebaran prostitusi;
7. Penyitaan terhadap buku-buku dan majalah-majalah cabul, gambar-gambar porno, film-film biru dan sarana-sarana lain yang merangsang nafsu seks;
8. Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Penanggulangan prostitusi secara preventif ini harus dilakukan oleh berbagai pihak baik dari instansi pemerintahan maupun masyarakat setempat sehingga dapat berjalan maksimal. Kepala Daerah, DPRD, Satpol PP, dan pihak Kepolisian perlu bekerjasama dengan masyarakat secara bersama-sama

melakukan tindakan seperti yang telah dijelaskan di atas untuk mencegah terjadinya praktek prostitusi di wilayah mereka.

Usaha represif dan kuratif dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan (menghapuskan, menindas), dan usaha menyembuhkan para wanita PSK untuk kemudian membawa mereka ke kehidupan yang benar. Usaha represif dan kuratif ini antara lain berupa:

- a. Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang melakukan pengawasan/kontrol yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para PSK serta lingkungannya;
- b. Untuk mengurangi prostitusi, diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang normal pada umumnya. Rehabilitasi dan resosialisasi ini dilakukan melalui: pendidikan moral dan agama, latihan-latihan kerja dan pendidikan keterampilan agar mereka bersifat kreatif dan produktif;
- c. Penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para PSK yang terkena razia; disertai pembinaan yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing orang;
- d. Pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu tetap untuk menjamin kesehatan para PSK dan lingkungannya;
- e. Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi PSK dan mau memulai hidup yang benar;

- f. Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga PSK dan masyarakat asal mereka agar mereka mau menerima kembali bekas-bekas PSK itu untuk mengawali hidup baru yang benar;
- g. Mencarikan pasangan hidup yang permanen/suami bagi para PSK untuk membawa mereka kembali ke kehidupan yang benar;
- h. Mengikutsertakan bekas PSK dalam usaha transmigrasi, dalam rangka pemerataan penduduk di tanah air dan perluasan kesempatan kerja bagi kaum wanita.

Penanggulangan prostitusi secara represif dan kuratif ini dilakukan oleh dinas sosial sebagai akibat telah terjadinya prostitusi di wilayah tertentu dan ditindaknya pelaku prostitusi secara hukum. Hal tersebut dilakukan agar pelaku prostitusi tidak kembali melakukan praktek prostitusi sehingga dapat hidup secara normal dan sebagaimana mestinya kehidupan yang layak.